

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

CHECKLISTS

**IMPLEMENTASI KERJASAMA PEMERINTAH BADAN USAHA
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
KEPENTINGAN UMUM DI LEVEL PEMERINTAHAN DAERAH**

CHECKLIST TAHAP PERENCANAAN

NO	CHECKLIST	OUTPUT
1	Penyusunan rencana anggaran dana KPBU	
	a. Apakah kondisi fiskal sudah memadai untuk mendukung pembangunan proyek yang bersifat <i>multi years</i> ?	KAK Pengadaan Badan Penyiapan yang mencakup latar belakang dan deskripsi KPBU, tujuan pekerjaan, lingkup jasa konsultansi untuk melaksanakan berbagai kajian kelayakan yang diperlukan, jumlah personil dan kualifikasi yang dibutuhkan, dokumen yang harus disiapkan, jadwal pelaksanaan, dan perkiraan besaran anggaran
	b. Apakah sumber dana pelaksanaan KPBU telah direncanakan (APBN, APBD, pinjaman/hibah atau sumber pendanaan lainnya)?	
	c. Apakah dalam rencana penganggaran telah meliputi setiap tahap pelaksanaan KPBU (tahap perencanaan, penyiapan, dan transaksi KPBU)?	
2	Identifikasi dan penetapan KPBU	
	a. Apakah telah dilakukan identifikasi jenis infrastruktur yang akan disediakan?	Dokumen Studi Pendahuluan yang terdiri dari:
	b. Apakah jenis infrastruktur yang direncanakan memiliki potensi untuk disediakan dengan skema KPBU?	
	c. Apakah telah ditentukan pihak yang melaksanakan proyek KPBU (Dirjen/Deputi/Direksi BUMN untuk KPBU yang diprakarsai Pemerintah Pusat atau Kepala perangkat daerah/Direksi BUMD untuk KPBU yang diprakarsai Pemerintah Daerah)?	
	d. Apakah studi pendahuluan telah selesai disusun?	
	e. Apakah studi pendahuluan sudah mencakup kajian mengenai analisis kebutuhan? <ul style="list-style-type: none"> ➤ Apakah proyek KPBU memiliki permintaan yang berkelanjutan? ➤ Apakah proyek KPBU mendapat dukungan dari pemangku kepentingan yang berkaitan? 	1. Kajian Analisis Kebutuhan
	f. Apakah studi pendahuluan sudah mencakup kajian mengenai kriteria kepatuhan? <ul style="list-style-type: none"> ➤ Apakah proyek KPBU sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah, Renstra K/L, dan/atau RKPd dan rencana bisnis BUMN?BUMD? 	2. Kajian Kriteria Kepatuhan

CHECKLIST TAHAP PERENCANAAN

NO	CHECKLIST	OUTPUT
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Apakah lokasi KPBU sesuai dengan RTRW? ➤ Apakah proyek KPBU memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah? 	
	<p>g. Apakah studi pendahuluan sudah mencakup kajian mengenai kriteria faktor penentu nilai manfaat uang (value for money) partisipasi badan usaha?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Apakah sektor swasta memiliki keunggulan dalam pelaksanaan KPBU (termasuk pengelolaan risiko)? ➤ Apakah efektivitas, akuntabilitas dan pemerataan pelayanan publik terjamin dalam jangka panjang? ➤ Apakah terdapat alih pengetahuan dan teknologi dengan adanya proyek KPBU ini? ➤ Apakah terjamin adanya persaingan sehat, transparansi, dan efisiensi dalam proses pengadaan? 	3. Kajian Kriteria Faktor Penentu Nilai Manfaat Uang (Value for Money) Partisipasi Badan Usaha
	<p>h. Apakah studi pendahuluan sudah mencakup kajian mengenai analisa potensi pendapatan dan skema pembiayaan proyek?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bagaimanakah potensi kemampuan pengguna untuk membayar? ➤ Bagaimanakah kemampuan fiskal Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD dalam melaksanakan KPBU? ➤ Apakah terdapat potensi pendapatan lainnya? ➤ Apa sajakah bentuk dukungan pemerintah yang memungkinkan? 	4. Kajian Analisa Potensi Pendapatan dan Skema Pembiayaan Proyek
	<p>i. Apakah studi pendahuluan sudah mencakup kajian mengenai rekomendasi dan rencana tindak lanjut?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Apakah telah diidentifikasi bentuk KPBU yang dapat direkomendasikan? ➤ Apakah telah diidentifikasikan usulan kriteria utama dalam pemilihan badan usaha? ➤ Apakah telah disusun usulan rencana jadwal kegiatan penyiapan dan transaksi KPBU? 	5. Kajian Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut
	<p>j. Apakah telah dilakukan konsultasi publik untuk memperoleh pertimbangan manfaat dan dampak KPBU terhadap kepentingan masyarakat?</p>	Berita Acara Konsultasi Publik yang memuat daftar peserta, notulensi pembahasan rencana KPBU, dan kesimpulan dan rencana tindak lanjut
	<p>k. Siapa sajakah yang terlibat dalam konsultasi publik? Apakah telah mencakup tanggapan dan masukan dari para pemangku kepentingan?</p>	
	<p>l. Apakah telah dilakukan evaluasi terhadap hasil konsultasi publik?</p>	
3	Penganggaran dana tahap perencanaan KPBU	
	<p>a. Apakah penganggaran dana tahap perencanaan telah mencakup proses penyusunan studi pendahuluan?</p>	

CHECKLIST TAHAP PERENCANAAN

NO	CHECKLIST	OUTPUT
	b. Apakah penganggaran dana tahap perencanaan telah mencakup proses pelaksanaan konsultasi publik?	
4	Pengambilan keputusan lanjut/tindak lanjut rencana KPBU	
	a. Apakah rencana KPBU telah diusulkan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas?	
	b. Apakah untuk usulan KPBU dalam proses penyiapan telah menyertakan dokumen penyiapan KPBU dan lembar ringkasan dari dokumen penyiapan KPBU?	
	c. Apakah untuk usulan KPBU siap ditawarkan telah menyertakan dokumen prastudi kelayakan, lembar ringkasan dari dokumen prastudi kelayakan dan surat pernyataan persetujuan prinsip dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah jika diperlukan?	
5	Penyusunan daftar rencana KPBU	
	a. Apakah Menteri PPN/Kepala Bappenas telah melakukan seleksi dan penilaian terhadap usulan KPBU?	Daftar rencana KPBU
	b. Setelah melakukan penyeleksian dan penilaian, apakah Menteri PPN/Kepala Bappenas telah menetapkan Daftar Rencana KPBU yang terdiri atas KPBU siap ditawarkan dan KPBU dalam proses penyiapan?	
6	Pengkategorian KPBU	
	a. Apakah rencana KPBU yang diusulkan telah dikategorikan sesuai dengan tingkat kesiapan?	
	b. Apabila rencana KPBU yang diusulkan dikategorikan sebagai KPBU siap ditawarkan, apakah sudah memenuhi kriteria sbb: <ul style="list-style-type: none"> ➤ memperoleh kepastian mengenai kesiapan KPBU, kesesuaian teknis, ketertarikan pasar, dan pilihan bentuk KPBU; ➤ telah menyelesaikan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan; ➤ telah disusun rancangan rinci spesifikasi keluaran; ➤ telah disusun rancangan struktur tarif; ➤ telah dilakukan analisis model keuangan, alokasi dan mitigasi risiko serta mekanisme pemberian Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah bilamana diperlukan; ➤ telah disusun rancangan rencana pengadaan Badan Usaha Pelaksana dengan mempertimbangkan: 1) potensi dan minat Badan Usaha dalam KPBU; 2) kewajaran rencana atau jadwal pelaksanaan pengadaan; dan 3) penetapan dan kesiapan Panitia Pengadaan. 	

CHECKLIST TAHAP PERENCANAAN

NO	CHECKLIST	OUTPUT
	<ul style="list-style-type: none">➤ telah disusun rancangan ketentuan perjanjian KPBU; dan➤ memperoleh persetujuan dari PJKP untuk KPBU atas prakarsa Badan Usaha dan kesepakatan dari para pemangku kepentingan atas KPBU	
	<p>c. Apabila rencana KPBU yang diusulkan dikategorikan sebagai KPBU dalam proses penyiapan, apakah sudah memenuhi kriteria sbb:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ kesesuaian dengan RPJM Nasional/Daerah dan Rencana Strategis sektor infrastruktur;➤ kesesuaian lokasi proyek yang akan dikerjasamakan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);➤ keterkaitan antarsektor Infrastruktur dan antarwilayah; dan➤ telah memiliki dokumen Studi Pendahuluan	